

**MAJELIS DIKTILITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI**

USULAN PENELITIAN INTERNAL



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN
BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA PADA
MASA SEBELUM DAN MASA
PANDEMI COVID -19**

oleh:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ratih Rosita, S.E., M.E | NIDN. 1011118603 |
| 2. Yorina An'guna Bansa, M.Pd | NIDN. 1031058501 |
| 3. Asrini, S.E., MSA | NIDN. 1006088102 |

**Dibiayai Oleh
Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi tahun Anggaran 2022/2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH JAMBI

2023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Masa Pandemi Covid -19”
2. Peserta Program : Penelitian Kelompok
3. Tim Penelitian
 - A) Ketua Tim Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Ratih Rosita, SE., ME
 - b. NIDN : 1011118603
 - c. Jabatan Fungsional: Lektor
 - d. Program studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - B) Anggota 1 :
 - a. Nama Lengkap : Yorina An’guna Bansa, M.Pd
 - b. NIDN : 1031058501
 - c. Jabatan Fungsional: Lektor
 - d. Program Studi : Ekonomi Manajemen
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah
 - Jambi Anggota 2 :
 - a. Nama Lengkap : Asrini, S.E., MSA
 - b. NIDN : 1006088102
 - c. Jabatan Fungsional: Lektor
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
4. Alamat Kantor/Telp/Email: Jl. Kapten Pattimura Simpang IV Sipin Jambi
5. Lokasi Kegiatan : Universitas Muhammadiyah Jambi
6. Rencana Kegiatan : 3 Bulan
7. Biaya Total Penelitian :
Dana UM Jambi : Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Jambi, 31 Desember 2022

Mengetahui,

Kaprodi Ekonomi Pembangunan
Universitas Muhammadiyah

Ratih Rosita, SE., ME
NIDN. 1011118603

Ketua Tim

Ratih Rosita, SE., ME
NIDN. 1011118603

Menyetujui:

Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah



Prima Audia Daniel, S.
NIDK. 885253003.E.,

017

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori	9
2.1.1 Ketimpangan.....	9
2.1.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	12
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.4 Pengangguran	23
2.1.5 Belanja Pemerintah.....	28
2.1.6 Hubungan Antar Variabel.....	31
2.2 Penelitian Sebelumnya	36
2.3. Kerangka Pemikiran	41
2.4. Hipotesis	43

BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data	44
3.1.1. Jenis Data	44
3.1.2. Sumber Data.....	44
3.2. Metode Analisis Data.....	44
3.3. Alat Analisis Data	46
3.4. Pengujian Hipotesis	47
3.4.1 Uji Statistik t.....	47
3.4.2 Uji Statistik F.....	47
3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	48
3.5. Operasional Variabel.....	48

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pandemi tersebut telah mempengaruhi kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional dan global secara serius sejak awal tahun 2020. Hingga 3 November 2020, secara kumulatif penduduk dunia yang terinfeksi virus tersebut mencapai 46 juta jiwa dengan jumlah kematian mencapai 1,2 juta jiwa (WHO,2020). Indonesia menjadi salah satu negara dengan penyebaran Covid relative tinggi di Asia. Hingga Juni 2021, tercatat 1.856.038 kasus positif Covid yang membuat Indonesia berada pada peringkat pertama jumlah penduduk terinfeksi virus tersebut. Dalam hal kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak dengan 51.612 orang meninggal. Penyebaran Covid yang relative cepat mendorong pemerintah mengambil sejumlah kebijakan guna memutus mata rantai virus tersebut.

Adanya himbauan pemerintah agar masyarakat menjalankan protocol kesehatan dan melakukan social distancing, membatasi perjalanan antar daerah, hingga munculnya peraturan yang berkaitan dengan pembatasan social berskala besar (PSBB) disejumlah daerah diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran Covid guna melindungi masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran virus tersebut yang kemudian diiringi dengan sejumlah kebijakan diatas telah berdampak buruk bagi perekonomian. Kegiatan ekonomi disektor tertentu seperti transportasi dan perdagangan mengalami penurunan yang sangat drastis. Akibatnya, tingkat

pengangguran meningkat, dikarenakan adanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan terutama didaerah perkotaan. Hingga Agustus 2020 rata-rata tingkat pengangguran 34 provinsi di Indonesia sebesar 6,03%, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode Februari tahun yang sama sebesar 4,46%. Kondisi tersebut tentunya dapat berpengaruh pada indikator makro ekonomi lainnya seperti ketimpangan distribusi pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan setidaknya didorong oleh beberapa faktor diantaranya yaitu inflasi, pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiskal, ketidakmerataan, distribusi dan lain-lain. Salah satu indikator yang mengambil peran penting dari faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah juga merupakan salah satu indikator dari perkembangan pendapatan nasional yang dicapai suatu daerah.

Badan Pusat Statistik mencatat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia Pada tahun 2017 sebesar 0,391%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,384% lalu pada tahun 2019 ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia mengalami peningkatan yaitu 0,385% tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 0,391% dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar 0,398%.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (istitusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Sadono Sukirno mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang yang didalamnya mencakup masalah kemiskinan masyarakat.

Pada krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia fluktuatif tiap tahunnya. Pada masa pemerintahan sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung naik, tetapi pada masa pemerintahan saat ini mulai menurun walaupun kedepannya ada potensi untuk semakin lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kesejahteraan, artinya semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi. Saputra (2011)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 mencapai 5,07%, kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,17% meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu sebesar 5,02%, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kontraksi dengan angka sebesar -2,07%. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 3,69%.

Ketimpangan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya penduduk yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan pada umumnya tidak memadai. Negara Indonesia sering

dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tersebut keempat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.

Data statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017 pengangguran di Indonesia mencapai 7.560.820 orang kemudian pada tahun 2018 pengangguran di Indonesia mengalami penurunan yaitu menjadi 7.031.390 orang, pada tahun 2019 pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 7.040.320 orang lalu pada tahun 2020 pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yaitu 9.767.850 orang dan pada tahun 2021 pengangguran di Indonesia mengalami penurunan menjadi sebesar 9.102.050 orang. .

Di Negara manapun, selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintahan yang dalam peraturan ekonomi negerinya berperan semata-mata hanya sebagai “wasit” atau “polisi”, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi peleraai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk dicega. Tidak ada satupun perekonomian, termasuk negara kapitalis atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya. Yang ada ialah perbedaan kadarnya, di beberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian, sementara di negara-negara lain campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas.

Belanja Pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. Belanja Pemerintah atau disebut belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.

Data statistik mencatat belanja pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 belanja pemerintah mencapai Rp 2.007.351 milyar kemudian pada tahun 2018 belanja pemerintah meningkat menjadi Rp.2.213.117milyar lalu pada tahun 2019 belanja pemerintah mengalami peningkatan lagi sebesar Rp.2.309.287 milyar pada tahun 2020 belanja pemerintah terus mengalami peningkatan menjadi Rp.2.595.481 milyar dan pada tahun 2021 belanja pemerintah mengalami peningkatan drastis lagi menjadi Rp.2.697.237 milyar.

Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ketahun selalu meningkat. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini, semakin besarnya Belanja Pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Belanja Pemerintah dapat bersifat “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu Belanja Pemerintah dapat pula bersifat “transfer” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah.

Berdasarkan penelitian Suliswanto (2010) mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi Terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hapsoro (2013) mengatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin menurun angka pengangguran maka semakin rendah ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rusdarti (2013) mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja pemerintah Terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Semakin meningkat belanja pemerintah maka semakin rendah ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Berdasarkan dari hasil menguraikan beberapa variabel di atas berupa tingkat kemiskinan yang semakin berkurang, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil bahkan cenderung menurun, jumlah pengangguran yang berkurang serta belanja negara yang semakin besar maka saya mengangkat judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Pada Masa Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata hanya untuk mengejar pertumbuhan PDB atau PDRB, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar masyarakat.

Ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh tidak meratanya pelaksanaan pembangunan antara lapisan masyarakat dan daerah akan mengakibatkan semakin timpangnya aspek ekonomi. Ketimpangan aspek ekonomi terlihat dari semakin timpangnya distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat dan daerah. Semakin timpangnya distribusi pendapatan tersebut membawa banyak konsekuensi negatif, salah satu adalah semakin tingginya tingkat kemiskinan. Konsep di atas mengandung pengertian bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikutidengan keberhasilan dalam mendistribusi hasil-hasilnya. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia pada masa sebelum dan masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia pada masa sebelum dan masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada masa sebelum dan masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada masa sebelum dan masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat akademisi

Sebagai media berupa bentuk pemahaman teoritis yang diperoleh dibangun perkuliahan dalam kehidupan nyata, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti kasus yang sama, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan belanja

2. Manfaat praktisi,

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau masukan untuk pemerintah mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia agar dapat mengetahui kondisi perekonomian yang sedang berjalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketimpangan

Ketimpangan adalah suatu keadaan yang tidak merata antara satu dengan yang lain. Ketimpangan dalam pembangunan juga masih terjadi pada saat ini antara negara maju dan negara berkembang, negara maju memiliki pengetahuan yang tinggi dari segi SDM dan bisa mengolah SDA yang dimiliki secara efektif dan efisien sedangkan negara berkembang yang belum memiliki SDM yang baik tidak mengolah SDA secara efektif.

Negara berkembang cenderung untuk membeli barang jadi dari negara maju yang mengakibatkan angka impor negara berkembang cenderung lebih tinggi daripada angka eksportnya sehingga mengakibatkan neraca perdagangan yang defisit pada negara berkembang.

Hal ini sangatlah menguntungkan bagi negara maju sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang cukup tinggi antara negara maju dan negara berkembang. Teori ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Arsyad (2004) bahwa penghapusan kemiskinan dan berkembang ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan.

Arsyad (2004) mengemukakan bahwa kesenjangan regional oleh diartikan sebagai ketidakseimbangan pertumbuhan antar sektor primer, sekunder, tersier atau sektor sosial di suatu negara, distrik, atau tempat di mana peristiwa itu terjadi. Pada

negara maju atau berkembang, negara pertanian atau industri, negara besar atau kecil, mempunyai wilayah yang maju dan tertinggal secara ekonomi.

Hal itu penting untuk menghubungkan pola pembangunan ekonomi regional dengan beragam variabel fisik dan sosial ekonomi untuk mengidentifikasi variabel mana yang mempunyai pengaruh terbanyak terhadap pola pertumbuhan. Kesenjangan tidak berlaku di semua wilayah dengan kekuatan (tingkatan) yang sama, tetap terdapat aspek-aspek umum yang dapat memberikan beberapa generalisasi, penyebab utama kesenjangan adalah:

- a. Faktor Geografis. Suatu wilayah yang sangat luas, distribusi dari sumberdaya nasional, sumber energi, sumberdaya pertanian, topografi, iklim dan curah hujan tidak akan merata. Apabila faktor-faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan menyebabkan suatu wilayah berkembang lebih baik.
- b. Faktor Historis Tingkat pembangunan suatu masyarakat juga bergantung pada masa yang lalu untuk menyiapkan masa depan. Bentuk organisasi ekonomi yang hidup di masa lalu menjadi alasan penting yang dihubungkan dengan isu insentif, untuk pekerja dan pengusaha. Sistem feodal memberikan sangat sedikit insentif untuk bekerja keras. Sistem industri dimana pekerja merasa tereksplotasi, bekerja tanpa istirahat, suatu perencanaan dan sistem yang membatasi akan memberi sedikit insentif dan menyebabkan pembangunan terhambat.

- c. Faktor Politik Ketidakstabilan politik dapat menjadi penghambat pembangunan yang sangat kuat. Jika pemerintah stabil tapi lemah, korupsi dan ketidakmampuan untuk mengalahkan sikap mementingkan diri sendiri dan menolak tekanan atau kontrol sosial akan menggagalkan tujuan dari kebijakan pembangunan. Kondisi politik di setiap wilayah tidak sama.
- d. Faktor Kebijakan Pemerintah Hampir semua negara kaya sedang diterapkan konsep Negara kesejahteraan (welfare of state). Di negara tersebut, kebijakan pemerintah mulai diarahkan secara langsung pada pemertaan regional yang lebih besar. Kekuatan pasar yang menghasilkan efek "backwash" dihilangkan, sementara yang menghasilkan efek menyebar didukung sementara di negara-negara miskin, kebijakan yang demikian masih sangat sedikit.
- e. Faktor Administrasi (birokrasi) Faktor administrasi yang efisien atau tidak efisien berpengaruh dalam menambah kesenjangan antar wilayah. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan administrator yang jujur, terdidik, terlatih dan efisien karena birokrasi yang efisien akan berhasil dalam pembangunan regional dan sebaliknya.
- f. Faktor Sosial Banyak faktor sosial yang menjadi penghalang dalam pembangunan. Penduduk di wilayah yang belum berkembang memiliki lembaga dan keinginan (attitude) yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Penduduk dari wilayah yang lebih maju memiliki kelembagaan dan keinginan yang kondusif untuk pembangunan.

- g. Faktor Ekonomi Penyebab secara ekonomis seperti perbedaan-perbedaan dalam faktor produksi, proses kumulatif dari berbagai faktor, siklus kemiskinan yang buruk, kekuatan pasar yang bebas dan efek "backwash" dan efek menyebar (spread) dan pasar tidak sempurna, berlangsung dan menambah kesenjangan dalam pembangunan ekonomi.

2.1.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu (Astuti, 2015).

Ketimpangan harus mendapat perhatian karena ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, inefisiensi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat (Todaro, 2006).

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights (Sukirno, 2006).

Hajiji, 2010 menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal. Distribusi pendapatan dapat berwujud

pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Rahayu, 2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha.

Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang, dan juga selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. Di negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan sejak tahun tujuh puluhan yang lalu (Putra, 2011).

Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar (Retnosari, 2006).

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dwi, 2010). Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu; distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing

orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan factor-faktor produksi (Dwi, 2010).

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan diantara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Ketimpangan merupakan hal umum yang terjadi dalam perekonomian suatu daerah. Ketimpangan dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing daerah. Oleh karena itu terdapat daerah maju dan daerah terbelakang di setiap daerahnya. Ketimpangan mengacu padastandar hidup yang relatif terhadap masyarakat, karena ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor anugerah awal. Perbedaan tersebut yang membuat tingkatpembangunan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Sehingga menimbulkan GAP atau jurang kesejahteraan di wilayah tersebut (Kuncoro, 2006). Menurut (Sukirno,2006), pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas antar daerah. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena adanya efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) dari output secara nasional terhadap masyarakat mayoritas yang tidak terjadi secara sempurna. Hasil output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas dengan tujuan tertentu (Musfidar, 2012).

Menurut Adelman dan Moris, dalam Arsyad (1999) mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yakni :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang banyak dalam proyek-proyek pada modal (*capital intensive*) sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.

6. Pelaksanaan kebijaksanaan industry substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang-barang hasil untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar (term off trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidaksetiaan permintaan negara-negara pada barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau memungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyusaian-penyusaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntunan keadaan yang ada. Masing-masing ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu. Yaitu, 1) kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari pada yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan penyediaan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economy maturity) disuatu Negara yang bersangkutan, 2) perkembangan teknologi merupakan dasar prakondisi bagi berlansungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang 27

diperlukan, tetap tidak cukup itu saja (jadi disamping kemajuan teknologi masih diperlukan faktor-faktor lain, 3) guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkadang didalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian kelembagaan, sikap, dan ideology. Astuti (2015).

Dalam analisis yang panjang lebar, mengemukakan enam karakteristik atau proses pertumbuhan ekonomi yang biasa ditemui hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut : 1) tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk, 2) tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, 3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, 4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, 5) adanya kecenderungan Negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomian untuk berusaha menambah bagian-bagian lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru, 6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia. Astuti (2015)

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur ekonomi antara lain yaitu. Astuti (2015).

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Produk Domestik Bruto (PDB) atau ditingkat regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun yang dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global fisiknya, dan bukan alat ukur ekonomi yang tepat, karena belum dapat dicerminkan kesejahteraan penduduk sesungguhnya, pada hal sesungguhnya kesejahteraan

yang harus dinikmati oleh setiap penduduk Negara atau daerah yang bersangkutan.

2. Produk Domestik Bruto perkapita/ pendapatn perkapita Produk Domestik Bruto perkapita atau Produk Regional Bruto (PDRB) per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih cepat mencerminkan kesejahteraan penduduk disuatu Negara dari pada nilai PDB atau PDRB saja, produk domestik bruto per kapita baik tingkat nasional maupun PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di Negara manapun didaerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata

Dalam bukunya *The Theory of Economic Development*, Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi mengalami keadaan dimana adakalanya berkembang dan pada seketika lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (enterpreneur) melakukan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi akan meningkatkan kegiatan ekonomi (Sukirno, 2013). Berikut ini adalah teori-teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi:

1. Teori Pertumbuhan Klasik
 2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar
 3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik
 4. Teori Pertumbuhan Baru
1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini muncul di masa revolusi industri (akhir abad ke-18) dan awal permulaan abad ke-19 dimana sistem liberal mendominasi dalam perekonomian

a. Adam Smith

Menurut Smith pertumbuhan bersifat kumulatif, artinya jika ada pasar yang cukup dan akumulasi kapital, akan ada pembagian kerja dengan produktivitas tenaga kerja menaik. Kenaikan ini menyebabkan pendapatan nasional naik untuk kemudian memperbesar jumlah penduduk dan memperluas pasar. Perkembangan berhenti oleh karena sumber alam terbatas jumlahnya, disamping berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*The Law Of Diminishing Return*).

Adam Smith menolak campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sistem perekonomian. Pengelolaan sistem perekonomian hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat (para pelaku ekonomi) dengan mekanisme pasarnya, dimana masyarakat (konsumen dan produsen) dapat menentukan harga pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran (hukum ekonomi pasar) (Riyadi dan Deddy Supriyadi, 2004).

b. David Ricardo

Menurut Ricardo masyarakat ekonomi dibagi menjadi tiga golongan yaitu, golongan kapitalis, golongan buruh, golongan tuan tanah. Sesuai dengan penggolongan di atas maka pendapatan nasional dibagi menjadi tiga yaitu, upah, sewa dan keuntungan.

c. Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa, kenaikan jumlah penduduk akan menimbulkan permintaan, dan hal ini merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan. Disamping itu juga, harus diikuti dengan kemajuan faktor perkembangan lainnya. Untuk mendukung perkembangan ekonomi dibutuhkan kenaikan kapital untuk investasi, dimana kapital tersebut didapat dari tabungan. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif yang disebabkan oleh pertambahan penduduk yang menekan upah. Selain itu pendapat yang diterima dan yang di tabungkan karena tidak dikonsumsi seluruhnya. Oleh karena itu, Malthus merasa pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Menurutnya setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilisasi tabungan dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar mengingatkan kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah (Sukirno, 2013).

Menurut Harrod-Domar pada hakekatnya investasi berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar terjadi pertumbuhan yang mantap atau Steady Growth yang dapat di definisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal yang akan selalu berlaku dalam

perekonomian. Inti dari pertumbuhan Harrod-Domar adalah suatu realisasi jangka antara peningkatan investasi (pembentukan modal) dan pertumbuhan ekonomi.

Teori Harrod-Domar memperlihatkan kedua fungsi dari pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Dalam teorinya pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Artinya apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang, disamping itu Harrod-Domar menganggap pula bahwa pertambahan dalam kesanggupan memproduksi itu tidak secara sendirinya.

Dengan demikian walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan tercipta, apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dalam teori Harrod-Domar menggunakan beberapa pemisalan berikut:

- a. Pada tahap permulaan perekonomian telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan alat-alat modal yang tersedia dalam masyarakat sepenuhnya dipergunakan;
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintahan dan perdagangan luar negeri tidak termasuk;
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasional, dan keadaan ini berarti bahwa fungsi tabungan dinilai dari titik nol;

d. Kecondongan menabung batas besarnya tetap, dan begitu juga perbandingan diantara modal dengan jumlah produksi yang lazim disebut rasio modal produksi (Capital Output ratio) dan perbandingan diantara pertambahan modal dengan jumlah pertambahan produksi yang lazim disebut rasio pertambahan modal produksi (Incremental Capital Out Ratio)

Pokok penjelasan dari teori tersebut bahwa penanaman modal yang dilakukan masyarakat dalam waktu tertentu digunakan untuk dua tujuan. Pertama untuk mengganti alat-alat modal yang tidak dapat digunakan lagi. Kedua untuk memperbesar jumlah alat-alat modal yang tersedia dalam masyarakat.

1. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori ini menyatakan perlunya teknologi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Unsur ini diyakini akan berpengaruh terhap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut kaum neo-klasik, laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan dalam penawaran factor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pendapat ini sepenuhnya berpangkal pada pemikiran aliran klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa.

Dalam teori ini, teknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh semua negara di dunia. Dalam perekonomian yang terbuka, semua faktor produksi dapat berpindah secara leluasa dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh setiap negara, maka pertumbuhan ekonomi semua negara di dunia akan konvergen, yang berarti kesenjangan akan berkurang (Kartasasmita, 1997).

2. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori ini menyatakan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994).

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000).

2.1.4 Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan

dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerja. Saputra (2011)

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang sedang aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan satu usaha atau penduduk yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerja tetapi belum memulai bekerja, Pengangguran terbuka adalah yang mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja. Saputra (2011)

Untuk mengelompokkan dan masing-masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi: 1) waktu banyak di antara mereka yang bekerja ingin lebih lama, misalnya jam kerjanya perhari, perminggu atau pertahun, 2) Intesitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan), 3) produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan). Arsyad, (2004). Ada 5 bentuk pengangguran yaitu:

1. Pengangguran terbuka: Baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).

2. Setengah menganggur (underemployment) yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu musiman) kurang dari yang mereka bisa bekerja.
3. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh, yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka atau setengah manganggur, termasuk disini adalah:
 - a. Pengangguran tak kentara (disguised unemployment), misalnya para petani yang bekerja diladang selama sehari penuh, padahal kerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.
 - b. Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment) misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
 - c. Pension lebih awal, fenomena ini merupakan kekayaan yang terus berkembang dikalangan pegawai perintah. Di beberapa Negara, usia pension dipermudah sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi yang muda-muda untuk menduduki jabatan diatasnya.
4. Tenaga kerja lemah (impaired) yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, tetapi intesitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
5. Tenaga kerja yang tidak produktif yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai maka tidak bisa menghasikan sesuatu.

Sejarah mencatat bahwa pembangunan ekonomi di Negara-negara eropa barat dan Amerika Utara yang sering dideskripsikan sebagai transfer manusia dan aktivitas ekonomi secara terus menerus dari daerah pedesaan kedaerah perkotaan. Hal ini

terjadi karena dua faktor, yaitu: 1) ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja baru, 2) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja di sektor pertanian sehingga menurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah pedesaan. Saputra (2011)

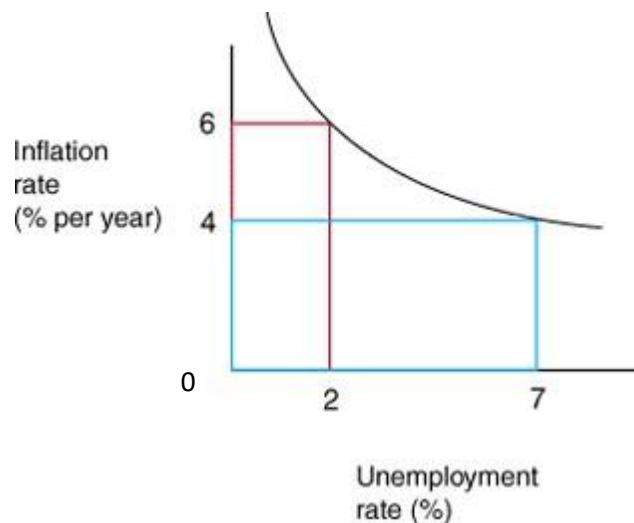
Jumlah orang yang mencari pekerjaan di Negara-negara berkembang tergantung pada jumlah serta komposisi umur penduduknya. Berbagai proses yang berkaitan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan tenaga kerja, terdapat dua masalah yaitu: pertama, Mortalitas dan fertilitas, tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduknya, adanya perbedaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan rendah. Penurunan tingkat kematian akan meningkatkan jumlah tenaga kerja sedangkan tingkat kelahiran yang tinggi mengakibatkan ketergantungan (dependency ration) yang tinggi serta tingginya kenaikan angkatan kerja dimasa mendatang. kedua, dampak penurunan fertilitas terhadap jumlah tenaga kerja dan struktur umur yang baru terasa dalam waktu jangka panjang walaupun penurunan tersebut berlangsung cepat. Saputra (2011)

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak sehingga akan menyebabkan jumlah lapangan kerja menjadi sempit atau sedikit. Hal ini dapat menyebabkan masalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah menunjukan kurang berhasilnya pembangunan dan menyebabkan kemiskinan. Saputra (2011)

Amri Amir (2007), menjelaskan bahwa teori A.W. Phillips muncul karena pada saat tahun 1929, terjadi depresi ekonomi Amerika Serikat, hal ini berdampak

pada kenaikan inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. berdasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara Inflasi dengan tingkat pengangguran, jika inflasi tinggi, pengangguran pun akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillip.

Gambar 2.1
Kurva Phillips



Berdasarkan gambar 2.1 A.W Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan

menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran berkurang. Menurut Dernburg dan Karyaman Muchtar (1992), inflasi dapat dikaitkan secara langsung dengan besarnya pengangguran yang terjadi. Hal ini dapat diketahui pada kaitan antara tingkat inflasi (upah) dengan tingkat pengangguran yang ditunjukkan dengan kurva phillips. Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (trade off) antara pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah.

2.1.5. Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah adalah Belanja Pemerintah diperuntukkan bagi pendanaan urusan pemerintah, baik urusan wajib, pilihan, dan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Pengeluaran belanja ini dapat mendukung berbagai program dan kebijakan-kebijakan dalam stabilitas perekonomian nasional (Siregar dan Faizah 2012).

Dalam neraca anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Belanja Pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintah sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga pemerintah, serta jumlah pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Agak sulit untuk membedakan dengan tegas apakah suatu pengeluaran termasuk kedalam pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan, karena batas perbedaan antara keduanya relative kabur. Sebagai contoh : berbagai macam upah dan gaji tambahan, yang menurut logika awal termasuk pengeluaran rutin, oleh pemerintah digolongkan sebagai pengeluaran pembangunan. Ada beberapa komponen belanja pemerintah. Siregar (2012). Yaitu:

- a. Belanja langsung dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai yang mengandung pengertian belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk upah lembur dan pengeluaran lain pegawai. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan berbagai program. Belanja barang dan jasa juga merupakan belanja langsung ini digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang nilai bermanfaatnya kurang dari setahu atau untuk pengeluaran pemakaian jasa untuk melaksanakan berbagai program. Belanja lain yang termasuk belanja langsung yaitu barang modal yang merupakan belanja untuk meningkatkan modal yang dapat menambah aset tetap bagi suatu Negara dengan melakukan pemilihan untuk

menpertahankan inventaris atau infrastruktur 36 yang dimiliki suatu Negara sehingga memberikan manfaat serta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas asset Negara.

- b. Belanja tidak langsung, meliputi : 1) belanja pegawai, yaitu belanja dalam bentuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai berupa gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai undang-undang, 2) belanja bunga yang merupakan belanja yang digunakan untuk pembayaran bunga utang berdasarkan kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian jangka pendek, menengah dan panjang, 3) belanja subsidi, belanja yang dianggarkan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar hasil produksi yang dilakukan perusahaan termasuk dapat dijangkau oleh masyarakat banyak, 4) belanjahibah, belanja yang diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa, 5) belanja bantuan sosial, belanja yang dianggarkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk jaminan sosial, perlindungan sosial dan pengatasan kemiskinan, 6) belanja bagi hasil dan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, 7) bantuan keuangan, belanja yang diberikan kepada daerah untuk pemerataan dan bantuan keuangan akibat kurangnya keuangan daerah, 8) belanja tidak terduga, belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga.

2.1.6 Hubungan Antar variabel

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan

Sukirno (2013) mengatakan terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat ketimpangan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat ketimpangan. Menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa berupah pola makanan pokoknya kebarang yang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan distribusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuan-tujuan pembangunan. Kedua hal tersebut kadang tidak bisa secara tumbuh bersama-sama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin distribusi pendapatan yang lebih baik. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut Laibson dan Acemoglu, (2019) pertumbuhan ekonomi suatu negara pada titik tertentu tidaklah sama dengan pendapatan seluruh individu negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan karena hanya sebagian pekerja dan kegiatan usaha yang memetik keuntungan dari adanya teknologi baru yang mendorong pertumbuhan tersebut. Fokus utama

perekonomian bukan hanya pada pendapatan perkapita tetapi harus mempertimbangkan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat.

Sebagian masyarakat ingin tinggal dalam lingkungan yang taraf hidupnya tidak terlalu timpang. Ketimpangan pendapatan yang terlalu besar akan menimbulkan polarisasi masyarakat atau kriminalitas yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan pada negara berkembang relatif lebih tinggi, karena pada proses kesempatan pembangunan dimanfaatkan oleh daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah terbelakang masih tidak dapat memanfaatkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi lebih cenderung cepat dialami oleh daerah dengan kondisi lebih baik, sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mengalami kemajuan (Hidayat, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat pengaruh signifikan dan tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang terdapat dalam penelitian (Ariadi & Muzdalifah, 2020; Isnaeni, 2017). Pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan pendapatan secara signifikan apabila pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi negatif maka pemerataan pendapatan dilakukan secara menyeluruh. Apabila pengaruh pertumbuhan ekonomi positif maka kemampuan pemerataan pendapatan belum merata secara menyeluruh. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang belum merata maka akan memperbesar ketimpangan pendapatan.

2. Hubungan Pengangguran dengan Ketimpangan

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya ketimpangan dan pengangguran. Bagi sebagian besar orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja separuh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termaksud diantara kelompok masyarakat kelas menengah atas. Namun demikian, salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Sebagian besar didalamnya adalah mereka yang bekerja secara tetap disektor pemerintah dan swasta termasuk dalam kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin atau mereka yang bekerja “full time” relative berpenghasilan baik (Sukirno, 2006). Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut Sjafrizal (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah salah satunya adalah karena perbedaan kondisi demografis. Demografis disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk didalamnya adalah tingkat pengangguran. Daerah dengan

kondisi demografisnya baik akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi ke daerah yang bersangkutan.

3. Hubungan Belanja Pemerintah dengan Ketimpangan

Terpenuhinya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dari negaranya. Pelayanan ini merupakan tersedianya barang dan jasa kebutuhan publik (air, listrik, kesehatan, pendidikan, keamanan) dan hak-hak publik lainnya untuk dapat hidup layak. Untuk mewujudkan kedua hal diatas, diperlukan kemampuan Negara (pemerintah) untuk mengadakan berbagai sarana dan fasilitas publik dan jasa pelayanan kebutuhan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Negara dan pemerintah seperti itu, diperlukan Negara yang memadai untuk menbiyai berbagai kebutuhan mencapai tujuan bernegara. Belanja Pemerintah dapat bersifat “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Di samping ini Belanja Pemerintah dapat pula bersifat “transfer” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (grants). Jadi exhaustive expenditure” mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Sedangkan “transfer payments” hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi yang lain dan menbiarkan yang terakhir ini menentukan penggunaan dari uang tersebut.

Menurut Sjafrizal (2008), bahwa dalam mengatasi ketimpangan wilayah dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong

transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. Maka dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut, diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkordinir yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah berskala kecil.

Menurut Wagner dalam suatu hukum bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dimana semakin besar anggaran daerah yang dikeluarkan maka pemerintah akan semakin mudah untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan publik. Disini peran pemerintah dalam hal investasi swasta di daerah tertinggal sangat dibutuhkan.

Investasi dibutuhkan untuk mendorong lebih besar daya produksi di daerah. Melalui modal yang ditanamkan oleh investor di daerah, akan mendorong diversifikasi produksi dan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Implikasi lanjutan dari hal itu secara teoritis akan membuka banyak alternatif lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan kurva pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat (Chalid, 2005). Menurut Majidi (dalam Kuncoro, 2004) strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi/ketimpangan regional.

Exhaustive expenditure dapat merupakan pembelian barang-barang dihasilkan oleh swasta misalnya bahan makanan, bangunan, mesin dan sebagainya dan dapat

pembelian itu dilakukan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai negaeri dan sebagainya.

Belanja Negara, idelanya bukan besaran dan vulumenya saja yang penting, namun yang juga perlu diperhatikan adalah ketapatan penggunaannya. Apakah dapat merangsang aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan publik. Sebagai contoh, dalam menyusun rencana belanja, dampak yang dapat ditimbulkan oleh belanja ini dimasyarakat harus difikirkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja negara atau pemerintah berperan penting dalam pengatasan kemiskinan.Noor (2015). Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Ariadi dan Muzdalifah (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk (1) Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan dari tahun 2010 hingga 2017. (2) Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. (3). Menganalisis Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang didapat melalui Badan Pusat Statistik dari kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis regresi data panel yaitu Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan, Pengangguran berpengaruh signifikan, dan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Lestari, *et al* (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Barat pada Tahun 2000-2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besar pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan time series dalam bentuk data tahunan dari tahun 2000-2018. Model analisis yang digunakan adalah Partial Adjustment Model (PAM) dengan dan diuji asumsi klasik yang meliputi uji autokorelasi dan uji heteroskedastis. Hasil estimasi menunjukkan adanya pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio dalam jangka panjang dan jangka pendek, dengan melihat variabel kelambanan sebesar 0.801149 dengan nilai $t - hit = 5.82$ atau nilai probabilitas 0.0000. Artinya bahwa syarat model PAM terpenuhi $0 < \beta_2$.

Sutiyono (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga dan pengaruh belanja modal APBD pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dengan mengambil populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Sedangkan belanja modal APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

Setiani (2015) melakukan penelitian tentang “Penerapan Regresi Spasial Untuk Pemodelan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2013”. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan dengan model regresi spasial. Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah jumlah penduduk miskin dan variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan jumlah pengangguran. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model otoregresif spasial (spatial autoregressive models, SAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik adalah SAR dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan adalah indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan jumlah pengangguran.

Fatkhul (2014), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)”. Dalam penelitian variabel independen yang digunakan adalah indeks

pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin. Model Ordinary Least Square (OLS) digunakan pada penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Adit (2010) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa 13 Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Adjusted R^2 cukup tinggi yaitu 0.982677. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan.

Desi (2015) melakukan penelitian tentang “Penerapan Regresi Spasial Untuk Pemodelan Ketimpangan di Indonesia Tahun 2013”. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan dengan model regresi spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik adalah SAR dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan adalah indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan jumlah pengangguran.

Suliswanto (2010), Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Di Indonesia. Tujuan Penelitian, untuk mengetahui Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Ketimpangan Di Indonesia. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan PDRB di masing-masing provinsi belum terlalu besar mengurangi angka ketimpangan, namun lebih dominan pengurangan angka ketimpangan dari variabel IPM.

Riva, (2014). Melakukan Penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Tujuan penelitian untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian. Hasil penelitian tingkat upah minimum provinsi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Hapsoro (2013), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Dalam Periode 2007-2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi seperti PDRB, jumlah pengangguran, dan tingkat inflasi terhadap ketimpangan kota di Indonesia. Analisis penelitian ini menggunakan data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel jumlah pengangguran dan tingkat inflasi berpengaruh positif.

Rusdarti (2013), meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh PDRB, pengangguran, dan belanja publik (bidang kesehatan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan). Analisis data menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti Belanja Pemerintah publik berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Di Indonesia masalah ketimpangan masih belum stabil, masalah mengenai ketimpangan yang tinggi dan cenderung belum stabil begitu penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya terhadap perekonomian yang bisa menyebabkan terhambatnya

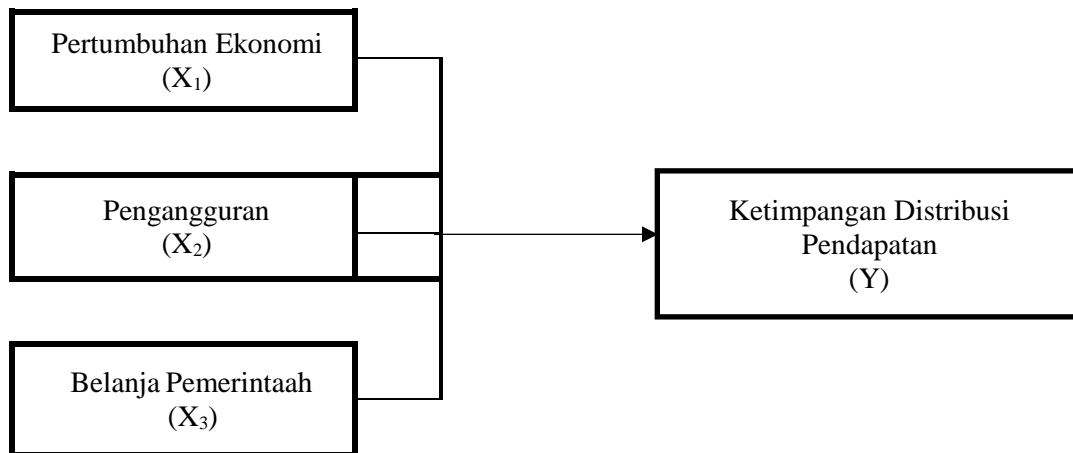
pertumbuhan ekonomi dan yang nantinya muncul masalah baru yaitu tingkat pengangguran yang selalu meningkat. Oleh karena itu pentingnya pengendalian terhadap ketimpangan serta melihat faktor-faktor apa saja yang dapat diambil dalam mempengaruhi ketimpangan agar dapat stabil.

Faktor-faktor moneter yang mempengaruhi ketimpangan antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi indikator yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan nasional dapat menyebar secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi ketimpangan.

Pengangguran pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya ketimpangan, tingkat pengangguran akan mempengaruhi tingkat ketimpangan.

Belanja Pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Dengan program yang tepat sasaran atau mengalokasikan dana yang termasuk Belanja Pemerintah maka ketimpangan semakin berkurang di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dan dalam kajian pustaka, maka variabel terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

1. Diduga pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2006-2021.
2. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Sugiyono, 2012). Jenis data sekunder yang digunakan yaitu *time series* periode 2006-2021. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Ketimpangan
2. Data Pertumbuhan Ekonomi
3. Data Pengangguran
4. Data Belanja pemerintah

3.1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia
2. Bank Indonesia (BI)

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Analisis deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata analisis deskriptif berfungsi

menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada analisis deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Sugiyono (2012).

Menurut (Sugiyono, 2012) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok atau suatu kondisi ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

3.2.1 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, serta akurat. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis yang datanya dapat diukur, diuji, dan diinformasikan dalam bentuk persamaan tabel dan sebagainya.

Analisa data yang bersifat kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2012). Metode kuantitatif ini sering juga disebut dengan metode tradisional, positivistik, ilmiah/scientific dan juga metode discovery. Metode penelitian kuantitatif ini dinamakan metode tradisional, sebab metode ini sudah cukup lama dipakai sehingga sudah dianggap sebagai metode tradisi untuk sebuah penelitian.

Teknik ini juga disebut sebagai metode positivistik sebab juga berlandaskan kepada filsafat positivisme. Metode atau teknik ini disebut sebagai metode ilmiah/scientific, disebabkan metode ini memiliki kaidah-kaidah ilmiah yang terpenuhi yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.

3.3 Alat Analisis

1. Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui dan menganalisis kondisi Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia tahun 2006-2021. Adapaun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut :

$$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan

X_t = Data tahun sekarang

X_{t-1} = Data Tahun sebelumnya

2. Untuk menjawab tujuan kedua yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendaptan di Indonesia tahun 2006-2021 dapat menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22. Persamaan model analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan dalam model berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Kemudian ditransformasikan dalam bentuk semilog dengan persamaa sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \text{Log}\beta_2 X_2 + \text{Log}\beta_3 X_3 + e$$

Di mana :

Y	= Ketimpangan Distribusi Pendapatan
α	= Konstanta
X1	= Pertumbuhan ekonomi
X2	= Pengangguran
X3	= Belanja pemerintah
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi masing-masing variabel independent
e	= Error term
Untuk menguji tingkat signifikan dari variabel independen terhadap variabel	

dependen, maka digunakan berbagai uji asumsi :

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Statistik t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. Dimana jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ H_0 diterima (signifikan) dan jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ H_0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

3.4.2 Uji Statistik F

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* secara signifikan terhadap variabel *dependent*. dimana jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima atau variabel independent secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependent (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan 5%.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R²*. Nilai *Adjusted R²* mempunyai interval 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R²* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika *Adjusted R²* bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3.5 Operasional Variabel

1. Ketimpangan adalah jumlah persentase ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode satu tahun dalam satuan persen (pendekatan gini rasio).
2. Pertumbuhan Ekonomi adalah Pertumbuhan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia periode satu tahun dalam satuan persen.
3. Pengangguran adalah jumlah orang yang termasuk dalam angkatan kerja, tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan periode satu tahun dalam satuan orang.
4. Belanja Pemerintah adalah Belanja Pemerintah menurut dari angka APBN periode satu tahun dalam miliar rupiah.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

Adapun ringkasan anggaran biaya dalam penelitian ini ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel Anggaran Biaya Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Gaji dan upah	800.000
2	Bahan Perangkat / Penunjang	100.000
3	Perjalanan dalam pengumpulan data	100.000
4	Pengolahan Data	100.000
5	Lain-lain (adm, seminar, laporan dll)	200.000
	Jumlah	1.300.000

4.2 JADWAL PENELITIAN

Berdasarkan metodologi penelitian yang telah dipaparkan pada BAB III, maka jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Kegiatan	Minggu									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Dan Penyempurnaan Proposal										
2	Persiapan Pengumpulan Data										
3	Penilaian Instrumen										
4	Pengolahan Dan Analisis Data										
5	Interpretasi Hasil Dan Perumusan Kebijakan										
6	Penulisan Laporan Penelitian										

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. 2007. “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia” (online), (<http://amriamir.wordpress.com>),
- Ariadi, V. N., & Muzdalifah, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kalimantan Selatan. *Urnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* , 485-499.
- Astuti, 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia . *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Vol.19, No.2.
- Arsyad, Lincolin. 2004. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.19, No. 2
- Adit, 2010. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan , *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol.4, No.1, Februari
- Badan Pusat Statistik, 2020. Gini Ratio, 2005-2020. Jambi: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik 2020. Pengangguran Dalam Persen (Juta Jiwa) 2000-2019. Jambi Badan Pusat Statistik.
- Books, Data. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (1961-2018), (online), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/31/inilah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-sejak-1961> di akses pada Rabu, 28 Oktober 2020.
- Chalid, Pheni. 2005. Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi. Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik: Jakarta
- Dernburg, Thomas F dan Karyaman Muchtar. 1992. Makro Ekonomi- Konsep, Teori dan Kebijakan. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga
- Dwi, Ravi. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jateng Tahun 2005-2008. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.1, Maret.
- Desi, 2015. Melakukan penelitian tentang “Penerapan Regresi Spasial Untuk Pemodelan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Vol.19, No.2

- Fatkhul, 2014. Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Malang : *Jurnal Ilmu Ekonomi Brawijaya*, Vol.4, No.3.
- Hajiji, Ajid, 2010, Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Propinsi Riau 2002-2008, Tesis, [Http://Respository.itb.ac.id](http://Respository.itb.ac.id), diakses 11 Maret 201
- Hapsoro, 2013. Melakukan penelitian mengenai Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan Di Indonesia Dalam Periode 2007-2010. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.10, No. 2
- Hidayat, M. H. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Investasi Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. Semarang, Jawa Tengah: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Isnaeni, I. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Banten 2009-2015. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kartasasmita, Koesnadi. 1997. Administrasi internasional. Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga: Jakarta
- Kuncoro, Muddrajad. 2006. Teori, Masalah, dan Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.19, No. 2
- Laibson, D. & Acemoglu, A.. (2019). Makroekonomi. Jakarta: Erlangga
- Mankiw, G. 2006. Makroekonomi. Jakarta : Erlangga.
- Musfidar, Ma'mun. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan tahun 2001-2010. Universitas Hasanuddin.
- Nor, 2015. Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, Vol.4, No.3.
- Riva, 2014. Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol 3, No.1.
- Putra, 2010. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur". *Journal of Economics and Policy*. Volume 8, Nomor 1. doi:10.15294/jejak.v7i1

- Romer, P. M. 1994. The Origins of Endogenous Growth Journal of Economic Perspectives. Vol. 8. No. 1
- Retnosari.2006.“Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat”.Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. 2004.Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Rusdarti, 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.19,No. 1
- Suliswanto, 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ekobis* 1 (1)
- Sapurta, 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.7, No.3, 186-201.
- Siregar, Liper, 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik,dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sukirno, Sadono, 2006, Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan, cetakan ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2013. Makro Ekonomi, Teori Pengantar. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Setiani,2015. Penerapan Regresi Spasial Untuk Pemodelan Ketimpangan di Indonesia Tahun 2013. Yogyakarta : *Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam, Universitas Islam Indonesia*.
- Syafrizal, 2008. Ekonomi Regional. BADUOSE MEDIA: Padang
- Todaro, Michael P. 2006. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga

